

REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGI POLITIK : DARI HUMANISTIK KE PROFETIK

Muhammad Nur

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Jalan Adisucipto, Yogyakarta, (0274) 512840,
Email: abi_ezra@yahoo.co.id*

Abstract: Politic, in every episode of history, seems full of intricate that pragmatics, so that politic the same with cruel, dirthy and anomaly. Many of stakeholders appriory by this situation. This is make politic more and more tiranic offcourse. That is way, very important think to advocate ethic and moral politic which base on universal values of prophet, namely prophetic of politic. Core of this models is humanis, liberation and transcendental. The implementations of this model take in Islamic nomocraton, as main of state management.

Abstrak : Diksi politik dalam hampir setiap episode sejarah selalu saja diwarnai oleh intrik-intrik yang bercita rasa pragmatis, sehingga politik terlanjur identik dengan kotor, kejam, buruk dan bulus. Sehingga muncul apriorisme di berbagai pihak yang jika dibiarkan tentu saja semakin merajalela dan memperburuk tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, perlu mendesakkan laku politik yang lebih beradab dan bermartabat, yang merujuk kepada nilai-nilai universal misi kenabian yang penulis sebut dengan politik profetik yang substansinya adalah humanis, liberasi dan transendensi. Substansi misi kenabian tersebut dalam kehidupan politik mengejawantah dalam nomokrasi Islam sebagai pilar pengelolaan negara.

Kata Kunci: *Politik, Profetik, Politik Profetik, Humanis, Transendensi*

Pendahuluan

Apa itu politik?. Secara retorik, Iwan Fals pernah mempermasalahkannya: “Apakah selamanya politik itu kejam?”. Memang pada masa pemerintahan Mao Tse-tung pernah diterapkan kebijakan Revolusi Kebudayaan. Dengan revolusi ini, setiap orang yang dicurigai berpikiran liberal (Amerika Serikat sentris) akan ditahan, diinterogasi, disiksa, bahkan jebloskan ke kamp-kamp kerja paksa untuk “membersihkan” otaknya. Hal ini mirip dengan masa Orde Baru, di mana orang-orang yang dianggap terlibat Partai Komunis Indonesia “dibuang” ke kamp-kamp “pembersihan otak” di Pulau Buru, Kepulauan Maluku. Kedua keputusan tersebut, baik di Cina maupun Indonesia adalah bukti keputusan politik, dan itu terkesan kejam. Namun, keputusan untuk memberi sertifikasi dosen, menaikkan gaji guru, menaikkan Upah Minimum Regional (UMR), atau kesempatan cuti haid bagi buruh perempuan dapatkah dikatakan kejam? Atau keputusan politik untuk menggratiskan biaya pendidikan di DKI Jakarta ala Jokowi, masukkah ke dalam kategori yang sama?

Berbicara mengenai politik, sejatinya tidak berbicara mengenai kejam atau tidak. Berbicara mengenai politik berarti membicarakan perilaku, khususnya cara mengatasi sejumlah perbedaan yang ada. “Cara” bergantung pada siapa yang menggunakan. Subyektivitas masing-masinglah yang menyebut cara yang dilakukan si A atau si B, atau pemerintah A atau B tersebut sebagai “kejam” atau tidak “kejam”.

Dalam politik dibicarakan mengenai bagaimana masyarakat di suatu wilayah saling menegosiasikan kepentingan masing-masing untuk kemudian melahirkan kesepakatan bagaimana kepentingan masing-masing tersebut dapat terselenggara tanpa merugikan pihak lain. Politik selalu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Tujuan awal politik tidaklah “kejam” seperti terlanjur dialami orang. Politik berasal dari bahasa Yunani; *polis* yang artinya negara kota. Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi satu sama lain guna mencapai kesejahteraan hidupnya. Manakala manusia mencoba untuk untuk menentukan posisinya dalam masyarakat,

manakala mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau manakala mereka berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka sibuk dengan suatu kegiatan yang dinamai sebagai politik.¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa siapapun tengah berpolitik ketika mempengaruhi suami atau istri di rumah, bersaing dengan kolega untuk jabatan dekanat, ketua atau sekretaris prodi, atau berdebat dengan mahasiswa yang tidak setuju dengan uang kuliah tunggal (UKT).

Dalam buku *A New Handbook of Political Science* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan politik adalah *the constrained use of social power* (penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan).² Di sini disebutkan “kekuasaan” sosial bukan “kekuasaan pribadi.” Pada zaman kaisar-kaisar Romawi dan raja-raja di pulau Jawa, seorang kaisar atau raja dapat saja menimpakan suatu hukuman mati pada seorang abdi atau rakyat lewat “kemauannya” sendiri. Rakyat luas tentu tidak sepakat dengan cara tersebut, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka menurut bukan karena setuju, tetapi karena takut. Kekuasaan raja atau kaisar tersebut bukan kekuasaan sosial, tetapi kekuasaan pribadi. Hanya satu orang yang menyepakati cara penghukuman, bukan seluruh orang menyepakatinya. Sebaliknya, politik adalah kekuasaan sosial dan sebagai kekuasaan sosial ia harus disepakati banyak orang sebelum suatu cara diterapkan. Politik menghendaki negosiasi, dari negosiasi baru dicapai kesepakatan. Dengan demikian, suatu kekuasaan politik adalah kekuasaan yang disepakati banyak orang, bukan kemauan satu orang.

Politik dalam Takaran Epistemologi

Dengan luasnya cakupan, dapatlah dikatakan bahwa politik dapat dikatakan sebagai ilmu layaknya ilmu Hukum dan Ekonomi. Ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara metodis, sistematis, obyektif, dan umum.

¹ Carlton Clymer Rodce, *Pengantar Ilmu Politik*, Cet. 5 (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 2-3.

² Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, *A New Handbook of Political Science* (New York: Oxford University Press, 1996), hlm.7.

Metodis artinya menggunakan metode, cara, jalan yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu. Sistematis artinya masing-masing unsur saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan, sehingga dapat tersusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Obyektif artinya kebenaran dari hasil pemikiran dari suatu bidang dapat memperoleh bobot obyektif (sesuai kenyataan), tidak lagi bersifat subyektif (menurut pemikiran sendiri). Dan akhirnya, umum, artinya tingkat kebenaran yang mempunyai bobot obyektif tersebut dapat berlaku umum, di mana saja dan kapan saja.³

Ilmu berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah “apa yang diperoleh dalam proses mengetahui tanpa memperhatikan obyek, cara, dan kegunaannya.”⁴ Orang tahu bahwa sepeda beroda dua, manusia hidup mengalir darah dalam tubuhnya, sinar matahari panas, atau pemerintah menerapkan kurikulum 2013. Namun, orang sekadar tahu tanpa mendalami apa itu, bagaimana darah mengalir, ke mana dan untuk apa? Atau, bagaimana sepeda yang cuma beroda dua tersebut dapat dikayuh seseorang dengan seimbang? Atau, bagaimana proses terjadinya keputusan pemerintah tentang pembaruan kurikulum? Dengan kalimat lain, pengetahuan tidak berbicara mengenai aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis suatu obyek. Pengetahuan relatif tercerai-berai sementara ilmu relatif tersusun secara teratur. Ilmu dapat menambah pengetahuan, sementara pengetahuan disistematisasikan oleh ilmu.

Ontologi Ilmu Politik

Secara sederhana, ontologi adalah ilmu tentang hakikat sesuatu atau benda/hal/aspek apa yang dikaji. Epistemologi adalah ilmu tentang bagaimana “ontologi” itu dipelajari, dibangun. Aksiologi adalah untuk apa bangunan ilmu yang dibuat diperuntukkan. Ontologi, epistemologi, dan

³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Rajawali, 1997), hlm. 29.

⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hlm. 293.

aksiologi merupakan aspek-aspek khusus ilmu, apapun bentuknya, tak terkecuali politik.⁵

Aspek ontologi ilmu ekonomi misalnya adalah barang dan jasa. Aspek ontologi ilmu sosial (sosiologi) adalah kekerabatan antar manusia, dan aspek ontologi ilmu fisika adalah materi dan gas. Ontologi berarti obyek-obyek yang dipelajari oleh suatu ilmu. Lalu, bagaimana dengan ilmu politik?. Secara ontologis, politik juga memiliki obyek-obyek kajian yang spesifik. Miriam Budiardjo menyebutkan sekurang-kurangnya ada lima obyek ontologis ilmu politik, yaitu: 1. Negara (*state*), yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya; 2. Kekuasaan (*power*), yaitu kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku; 3. Pengambilan keputusan (*decision-making*) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif keputusan mulai dari proses sampai keputusan itu dicapai; 4. Kebijakan umum (*public policy*), yaitu cara yang ditempuh dalam memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Pihak yang membuat kebijakan memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya; 5. Pembagian (*distribution*) nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang berharga dan penjatahan dari nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat, yang pada gilirannya kerap tidak merata dan akhirnya melahirkan konflik.⁶

Epistemologi Ilmu Politik

Secara sederhana, epistemologi berarti bagaimana suatu ilmu dibangun. Dalam membangun suatu ilmu, seorang ahli teori dibatasi oleh periode hidup serta hal-hal lain yang mempengaruhi pikirannya saat membangun suatu ilmu. Sebagai contoh, pada abad pertengahan, pelajaran mengenai tata surya dipengaruhi suatu kesimpulan umum bahwa matahari mengelilingi bumi. Artinya, pusat tata surya adalah bumi, bukan matahari. Namun pendapat ini

⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm.31.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 9.

berubah tatkala Nicolaus Copernicus melontarkan pendapat bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi melainkan sebaliknya. Dengan demikian, pelajaran mengenai sistem tata surya pun berubah. Demikian pula dengan politik. Politik memiliki paradigma, metode, dan pendekatan yang beragam dalam bangunannya.⁷

Aksiologi Ilmu Politik

Ilmu hukum berorientasi pada peningkatan keteraturan tata kehidupan masyarakat, ilmu ekonomi berorientasi pada bagaimana seseorang dapat makmur secara material dan ilmu militer berorientasi pada penciptaan prajurit-prajurit yang dapat menjamin keamanan negara. Ketiganya adalah aksiologi. Aksiologi adalah guna dari suatu ilmu atau untuk apa ilmu tersebut diperuntukkan.

Aksiologi ilmu politik adalah untuk memberi “jalan atau cara” yang lebih baik dalam hal negosiasi kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Ilmu politik (menurut Aristoteles) bertujuan untuk “membahagiakan hidup manusia” yang tinggal dalam suatu wilayah yang sama.⁸ Secara khusus, bagi mahasiswa Hukum Administrasi Negara, diharapkan memberi wawasan dalam kerja keseharian, sebagai administrasi negara ia berada dalam suatu kawasan yang bernama negara. Ia terikat oleh aturan-aturan (legislasi) yang dibuat pemerintah (DPR dan Eksekutif). Bagi mahasiswa ilmu politik diharapkan memberi wawasan bahwa masyarakat terpengaruh oleh sebuah keputusan politik, dan sebaliknya, suatu kondisi masyarakat akan memberi pengaruh-pengaruh tertentu atas kehidupan politik.

Interkoneksi Ilmu Politik

Ilmu politik tidak benar-benar bersifat independen (berdiri secara bebas). Ilmu politik juga dipengaruhi oleh ilmu lain.⁹ Pengaruh ini dapat

⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, hlm. 32.

⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

⁹ Ronald HLM. Chilcote, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm* (Colorado:

dilihat dari konsep-konsep (gagasan) dari ilmu-ilmu lain yang dipakai dalam studi politik. Beberapa di antaranya; sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat, antropologi, teologi (ilmu ketuhanan) dan ilmu jurnalistik serta para praktisi politik.¹⁰ Ilmu tersebut telah terinternalisasi dengan baik sehingga menjadi konsep-konsep mapan di dalam ilmu politik yang melahirkan subdisiplin ilmu politik.

Para pakar yang tergabung ke dalam International Political Science Association telah membagi disiplin ilmu politik ke dalam sub-sub disiplin yang lebih rinci. Ada 9 subdisiplin yang berada dalam naungan ilmu politik, yaitu; 1. Ilmu Politik (*Political Science*). Bidang ini membahas bagaimana politik dapat dianggap sebagai bidang ilmu tersendiri; sejarah ilmu politik; dan hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lain; 2. Lembaga-lembaga Politik. Bidang ini mempelajari lembaga-lembaga politik formal yang mencakup: sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dewan legislatif, struktur pemerintahan, otoritas sentral, sistem peradilan, pemerintahan lokal, pelayanan sipil, serta angkatan bersenjata; 3. Tingkah Laku Politik. Bidang ini mempelajari tingkah laku politik bukan hanya aktor dan lembaga politik formal, tetapi juga aktor dan lembaga politik informal. Misalnya mempelajari perilaku pemilih dalam ‘mencoblos’ suatu partai dalam pemilu, bagaimana sosialisasi politik yang dilakukan dalam suatu sekolah, bagaimana seorang atau sekelompok kuli panggul memandang presiden di negara mereka; 4. Politik Perbandingan. Politik perbandingan adalah suatu subdisiplin ilmu politik yang mempelajari; Perbandingan sistematis antar negara, dengan maksud untuk mengidentifikasi serta menjelaskan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan yang ada di antara negara yang diperbandingkan. Bagaimana metode riset membangun suatu standar, aturan, dan analisis atas perbandingan yang dilakukan; 5. Hubungan Internasional. Bidang ini mempelajari politik internasional, politik luar negeri, hukum internasional,

Westview Press, 1981), hlm. 57

¹⁰ Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, *A New Handbook of Political Science*, hlm.103.

konflik internasional, serta organisasi-organisasi internasional. Singkatnya, segala aktivitas politik yang melampaui batas yuridiksi wilayah suatu negara;

6. Teori Politik. Bidang ini secara khusus membahas pembangunan konsep-konsep baru dalam ilmu politik. Misalnya mengaplikasikan peminjaman konsep-konsep dari ilmu sosial guna diterapkan dalam ilmu politik, yang melahirkan sosiologi politik. Konsep-konsep yang dibangun oleh subdisiplin ilmu politik digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena politik yang ada. Misalnya, saat ini ilmu politik telah mengaplikasikan suatu teori baru yaitu *feminism theory*. Teori ini digunakan untuk menjelaskan fenomena maraknya gerakan-gerakan perempuan di hampir seluruh belahan dunia. Atau, untuk menjelaskan politik “menutup” diri Jepang dan Amerika Serikat (sebelum Perang Dunia I), diterapkan teori isolasionisme (pinjaman dari bahasa jurnalistik);

7. Administrasi dan Kebijakan Publik. Bagian ini mempelajari rangkuman aktivitas pemerintah, baik secara langsung atau tidak langsung (melalui agen), di mana aktivitas ini mempengaruhi kehidupan warga negara;

8. Ekonomi Politik. Bagian ini menekankan pada perilaku ekonomi dalam proses politik serta perilaku politik dalam pasar (*market place*);

9. Metodologi Politik. Bagian ini khusus mempelajari paradigma (metodologi) serta metode-metode penelitian yang diterapkan dalam ilmu politik, apakah pendekatan kualitatif atau kuantitatif yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Demikian pula aneka ragam uji statistik (dalam tradisi behavioral analysis) yang digunakan untuk menganalisis data.¹¹

Diskursus politik semakin mendiaspora dengan beragam pendekatan yang digunakan. Pendekatan adalah dari sudut mana serta bagaimana seseorang melihat suatu permasalahan. Dalam mendidik anak, orang tua bisa melakukan tiga pendekatan: Otoriter, Laissez Faire, dan Demokratis. Jika dalam pendekatan otoriter, orang tua hanya mau dituruti pendapatnya oleh si anak, maka pada pendekatan Laissez Faire cenderung membebaskan atau membiarkan, sementara demokratis mengajak dialog dua arah.¹²

¹¹ Bidang-bidang ini merujuk pada Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann.

¹² David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 46.

Pendekatan dalam ilmu politik terbagi tiga, yaitu; 1. pendekatan tradisional; 2. pendekatan behavioral; 3. pendekatan post-behavioral. Ketiga pendekatan itu dikategorisasi berdasarkan periode. Pendekatan tradisional muncul terlebih dahulu (sejak zaman Yunani Kuno) untuk kemudian secara berturut-turut, disusul dua pendekatan setelahnya. Para pemikir politik seperti Plato atau para ahli politik seperti Montesquieu, Jean Jacques Rousseau atau John Stuart Mill mendekati permasalahan politik dengan pendekatan tradisional. Pasca Perang Dunia Kedua, muncul pendekatan behavioral yang memisahkan fakta dengan nilai dalam menganalisis permasalahan politik. David Easton, David E. Apter atau Gabriel A. Almond adalah eksponennya. Saat pendekatan behavioral dinilai tidak lagi “sensitif” di dalam menganalisa gejala politik, pada tahun 1960-an muncul pendekatan Post-behavioral. Teoretisi seperti Andre Gunder Frank, Cardoso, atau di Indonesia Arief Budiman dapat diklasifikasikan ke dalam pendekatan ini, yang menganalisis gejala politik secara lebih komprehensif dengan memperhatikan karakteristik wilayah serta kepentingan apa yang sesungguhnya melandasi sebuah tindakan politik. Ketiga pendekatan ilmu politik di atas tidak terpisah (terkotakkan) secara “*zakelijk*” (tepat/pasti) melainkan kadang tercampur satu sama lain.¹³

Pendekatan dianalogikan dengan enam orang yang menganalisa suatu rumah. Rumah misalkan terdiri atas enam aspek, yaitu : fondasi, dinding, atap, halaman, distribusi air, dan keindahan ruangan. Orang yang meneliti sebuah rumah dari sisi fondasi tentu berbeda cara dan kesimpulan dari orang yang mengamati melalui atap. Demikian pula, orang yang ahli sistem pengairan tidak dapat menyimpulkan hasil penelitian melalui halaman. Demikian pula halnya dalam ilmu politik. Pendekatan satu dengan pendekatan lain berbeda baik dalam hal meneliti serta menyimpulkan sebuah gejala politik.

David E. Apter menyebut enam pendekatan dalam memahami fenomena politik. Keenam pendekatan tersebut memiliki pendukung dan karakteristik khasnya masing-masing. Namun, sama seperti masalah rumah di atas, meskipun keenam perspektif tersebut berbeda, tetapi tetap menganalisa

¹³ *Ibid.*, hlm. 47

satu bidang yaitu rumah. Demikian pula halnya dalam politik. Keenam pendekatan itu sama-sama menganalisa satu bidang yaitu fenomena politik.¹⁴ Keenam pendekatan itu adalah; 1. Filsafat Politik; 2. Institusionalisme; 3. Behavioralisme; 4. Pluralisme; 5. Strukturalisme; dan 6. Developmentalisme.

Filsafat Politik adalah suatu pendekatan ilmu politik yang relatif abstrak sebab berbicara pada dataran filosofis dari kegiatan politik. Pendekatan ini mengkaji mengapa suatu negara terbentuk, apa tujuan negara, siapa yang layak memerintah, di mana posisi ideal penguasa dengan yang dikuasai, bagaimana moral politik. Dalam pendekatan filsafat politik dikenal empat tradisi besar yaitu tradisi klasik, pertengahan, pencerahan, dan radikal.

Tradisi klasik dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles. Plato (427-347 SM) hidup pada masa ketika negara-kota Athena menjadi rebutan orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk memimpin. Plato mempromosikan filsafat politiknya demi memberi arahan yang benar seputar bagaimana menyelenggarakan kehidupan bernegara. Bagi Plato, kehidupan negara yang sempurna akan tercapai jika prinsip-prinsip keadilan ditegakkan. Keadilan menurut Plato adalah tatanan keseluruhan masyarakat yang selaras dan seimbang. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang dipersatukan oleh tatanan yang harmonis, di mana masing-masing anggota memperoleh kedudukan sesuai dengan kodrat dan tingkat pendidikan mereka.

Negara, bagi Plato, terdiri atas tiga golongan besar, yaitu (1) para penjamin makanan (pekerja); (2) para penjaga; dan, (3) para pemimpin.¹⁵ Para pekerja terdiri atas mereka yang bekerja agar barang-barang kebutuhan manusia tersedia. Para pekerja meliputi petani, tukang, pedagang, buruh, pengemudi kereta, dan pelaut. Karena mereka hanya memahami kepentingan mereka sendiri, mereka harus diatur agar hidupnya selaras dengan kepentingan umum oleh para penjaga. Golongan kedua (para penjaga) mengabdikan seluruh hidupnya demi kepentingan umum. Untuk itu, golongan penjaga

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 48-49.

¹⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 187-8.

dilarang untuk memuaskan kepentingan pribadi masing-masing. Mereka dilarang berkeluarga, wanita dan anak dimiliki bersama, tidak boleh punya milik pribadi, hidup, makan serta tidur bersama-sama. Golongan penjaga 'disapah' sejak umur 2 tahun, diberi pendidikan yang materinya mengarah pada tertib dan kebijaksanaan seperti filsafat, gimnastik, dan musik. Golongan ketiga (para pemimpin) dipilih di antara para penjaga, khususnya mereka yang paling memahami filsafat. Dengan demikian, seorang penguasa bagi Plato harus seorang filosof. Dengan menguasai filsafat, seorang raja mampu memahami hakikat-hakikat rohani di belakang bayang-bayang inderawi yang selalu berubah-ubah. Hal ini mungkin dilakukan oleh sebab filosof telah melepaskan diri dari ikatan nafsu dan indera serta bebas dari pamrih. Sebab itu dapat dikatakan bahwa sumber kekuasaan adalah pengetahuan yang dicapai melalui pendidikan. Penguasa menggunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingan umum sebagai hasil dari kecerdasan mereka. Kepentingan umum merupakan pemenuhan setiap potensi-potensi yang ada pada diri individu. Otoritas akan dijalankan oleh filosof yang memerintah untuk menegakkan keadilan. Keadilan diberikan kepada rakyat untuk diselenggarakan pada pemenuhan potensi-potensi yang dicapai melalui pekerjaan. Pekerjaan akhirnya akan menghasilkan sumber-sumber yang perlu untuk otoritas.

Aristoteles (384-322 SM) mempersamakan tujuan negara dengan tujuan manusia, yaitu menciptakan kebahagiaan (*Eudaimonia*). Manusia adalah makhluk sosial sekaligus *zoon politikon* (makhluk politik), sebab manusia tidak dapat berbuat banyak demi mencapai kebahagiaan tanpa bantuan orang lain. Sebab itu, manusia harus berinteraksi di dalam negara demi mencapai kebahagiaan hidup sendiri dan bersama. Dengan demikian, tugas negara bagi Aristoteles adalah mengusahakan kebahagiaan hidup warga negaranya. Aristoteles menentang gagasan Plato untuk menyerahkan kekuasaan negara kepada filosof yang tanpa konstitusi. Sebaliknya, Aristoteles menyarankan pembetukan suatu negara bernama *politeia* (negara yang berkonstitusi). Pemimpin negara adalah orang yang ahli dan teruji kepemimpinannya secara praktis, bukan filosof yang hanya duduk di 'menara gading'. Sumber

kekuasaan dalam *politeia* adalah hukum. Bagi Aristoteles, kekuasaan suatu negara harus berada di tangan banyak orang agar suatu keputusan tidak dibuat secara pribadi melainkan kolektif. Namun, kekuasaan tersebut jangan berada di tangan golongan miskin atau kaya, melainkan golongan menengah. Artinya, bentuk kekuasaannya berada di tengah-tengah antara oligarki dan demokrasi. Satu hal penting lain, seluruh penguasa harus takluk kepada hukum. Bagi Aristoteles, negara sama seperti organisme: Ia mampu berkembang dan mati. Aristoteles menekankan pentingnya konstitusi campuran yang merupakan aturan dasar kehidupan bernegara. Konstitusi ini harus menunjuk kebahagiaan setiap individu sebagai hal ideal yang harus dicapai suatu negara. Kebahagiaan secara praktis diturunkan ke dalam bentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan praktis. Setiap kebijaksanaan menghasilkan pilihan-pilihan baru bagi warga negara yang nantinya diwujudkan ke dalam bentuk konstitusi campuran.¹⁶

Tradisi Abad Pertengahan dimotori oleh Santo Agustinus, Thomas Aquinas, dan Martin Luther. Santo Agustinus (13 Nopember 354 M - 28 Agustus 430 M). Agustinus menulis magnum opus-nya *De Civitate Dei* (Kota Tuhan). Ia membagi negara ke dalam dua substansi: Sekuler dan Surgawi. Negara sekuler (diaboli) adalah negara yang jauh dari penyelenggaraan hukum-hukum Tuhan, sementara negara surgawi sebaliknya. Negara Surgawi (disebut pula negara Allah) ditandai oleh penjunjungan tinggi atas kejujuran, keadilan, keluhuran budi, serta keindahan. Negara sekuler ditandai oleh kebohongan, pengumbaran hawa nafsu, ketidakadilan, pengkhianatan, kebobrokan moral, dan kemaksiatan. Konsepsi negara surgawi dan diaboli dianalogikan Agustinus seperti kisah Kain dan Habel. Perilaku Kain yang negatif mencerminkan pengumbaran hawa nafsu, sementara perilaku Habel mencerminkan ketaatan pada Tuhan.¹⁷

¹⁶ J.HLM. Rapar, *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm.158-184.

¹⁷ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 76.

Santo Thomas Aquinas (1225-1274 M) dalam Magnum opusnya “Summa Theologia” mengatakan bahwa negara adalah sama sekali sekuler (kebalikan Agustinus). Negara adalah alamiah sebab tumbuh dari kebutuhan-kebutuhan manusia yang hidup di dunia. Namun, kekuasaan untuk menjalankan negara itu berasal dari Hukum Tuhan (*Divine Law*). Sebab itu, kekuasaan harus dipergunakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan hukum Tuhan. Penguasa harus ditaati selama ia mengusahakan terselenggaranya kepentingan umum. Jika penguasa mulai melenceng, rakyat berhak mengkritik bahkan menggulingkannya. Namun, Aquinas menyarankan “Jangan melawan penguasa yang tiran, kecuali sungguh-sungguh ada seseorang yang mampu menjamin stabilitas setelah si penguasa tiran tersebut digulingkan.” Hal ini senada dengan ujaran Ibn Taimiyyah yang paling tersohor enam puluh tahun dengan penguasa zalim jauh lebih baik daripada sehari tanpa penguasa.¹⁸

Martin Luther (1484-1546 M) memberontak terhadap kekuasaan gereja Roma pada tahun 1517. Sebab-sebab pemberontakannya adalah mulai korupnya kekuasaan Bapa-Bapa gereja, dengan mengkomersilkan surat pengampunan dosa (surat *Indulgencia*). Luther juga prithatin dengan gejala “takhayulisme” dan *mitologisme* patung-patung orang-orang suci gereja. Keprihatinan lain Luther adalah anggapan suci yang berlebihan atas para pemuka agama, sebab sesungguhnya mereka pun manusia biasa. Berbeda dengan pemikiran Katolik pertengahan, Luther menyarankan pemisahan kekuasaan gereja (agama) dengan kekuasaan negara (sekuler). Luther menuntut Paus agar mengakui kekuasaan para raja tanpa mengintervensi penyelenggaraan kekuasaan dengan dalih-dalih penafsiran kitab suci. Gereja harus dipisah dari negara. Penyembahan Tuhan dijadikan penghayatan oleh subyek, bukan terlembaga seperti gereja Katolik. Wahyu turun dari Tuhan. Dari wahyu muncul nalar, dan dari nalar tampil hukum alam. Dari hukum alam lahir hukum praktis yang mengatur harta benda, warisan, dinas militer, dan kewajiban-kewajiban lain. Hukum praktis dibuat oleh rakyat dan disebut

¹⁸ Santo Thomas Aquinas, *Summa Theologia*, translated by the Father of the English Dominican Province (North Carolina, USA: Hoyer Barton Press, 1912), hlm. 132.

dengan hukum positif, yaitu hukum yang menunjukkan apa-apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Hukum tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kejayaan (*grace*).¹⁹

Tradisi Pencerahan dilakoni oleh Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu dan Jean Jacques Rousseau.²⁰ Dalam magnum opus-nya "*Il Principe*" (sang pangeran), Machiavelli (1469-1527 M) menandakan bahwa kekuasaan merupakan awal dari terbentuknya negara. Negara adalah simbol kekuasaan politik tertinggi yang sifatnya mencakup semua dan mutlak. Berbeda dengan pemikiran Agustinus, Aquinas, dan Luther, bagi Machiavelli kekuasaan ada di dalam dirinya sendiri, mutlak, bukan berasal dari Tuhan atau doktrin agama manapun. Justru, agama, moral bahkan Tuhan, dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan oleh penguasa. *Il Principe* menceritakan soal apa yang seharusnya dilakukan seorang raja untuk mempertahankan atau menambah kekuasaannya. Raja harus licik sekaligus jujur. Tujuan seorang penguasa adalah mempertahankan kekuasaan dan untuk itu, ia harus menyelenggarakan kesejahteraan rakyat secara umum agar si penguasa tersebut semakin dicintai dan didukung rakyat agar terus berkuasa.

Thomas Hobbes (1588-1679 M) dalam Magnum opus-nya "*Leviathan*" mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*), sebab manusia secara mendasar memiliki naluri-naluri 'buas' di dalam dirinya. Situasi dalam masyarakat sebelum adanya negara adalah *Bellum Omnium Contra Omnes* (perang semua lawan semua). Untuk mengatasi situasi perang tersebut perlu dibentuk negara guna menciptakan stabilitas dan kedamaian. Hobbes berbeda dengan Aristoteles sebab memperbolehkan

¹⁹ Martin Luther, *Disputation of Doctor Martin Luther on the Power and Efficacy of Indulgences (95 theses)* (Philadelphia: A.J. Holman Company, 1915), hlm. 29-38.

²⁰ Lihat Lee Cameron McDonald, *Western Political Theory Part 2: From Machiavelli to Burke* (Pomona: Harcourt race Jovanovich, 1968), hlm.194-207. Bahasan yang cukup populer (berupa cerita gambar) dapat dilihat dalam Pax Benedanto, *Politik Kekuasaan menurut Niccolo Machiavelli (Il Principe)* (Jakarta: Gramedia, 1999).

pemerintahan tanpa konstitusi. Bagaimana raja terjaga dari kemungkinan penyelewengan kekuasaan? Hobbes menjawab: “Tidak mungkin sebab raja dituntun oleh hukum moral di dalam dirinya!”²¹

John Locke (1632-1704 M) dalam Magnum opusnya “*Two Treatises of Government.*” Mengatakan bahwa, manusia pada dasarnya adalah baik, tetapi ia berangsur-angsur memburuk perilakunya karena menjaga harta milik dari jarahan individu lain. Sebab itu, negara dibutuhkan untuk menjamin hak milik pribadi. Namun, negara yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan kekuasaan yang ada harus dibeda-bedakan. Locke berbeda dengan Hobbes, bahwa kekuasaan seorang raja harus dibatasi. Tidak hanya itu, Locke menyarankan adanya 3 bentuk kekuasaan yang terpisah, yaitu Legislatif (pembuat UU) Eksekutif (pelaksana UU) Federatif (hubungan dengan luar negeri). Locke menyarankan diselenggarakannya demokrasi perwakilan. Artinya, wakil-wakil rakyat yang membuat undang-undang. Namun, orang yang mewakili rakyat haruslah laki-laki, dan berasal dari kelas borjuis.²²

Montesquieu (1689-1755 M) dalam Magnum opusnya “*The Spirit of the Laws*” menyatakan bahwa untuk menjamin kebebasan warga negara, perlu memisahkan tiga jenis kekuasaan, yaitu Legislatif (membuat UU), Eksekutif (melaksanakan UU), dan Yudikatif (mengawasi pembuatan dan pelaksanaan UU).²³

Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M) dalam Magnum opusnya “*The Social Contract*” menyebutkan bahwa negara terbentuk lewat suatu perjanjian sosial. Artinya, individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan dan kekuasaan yang dimilikinya kepada kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara. Negara berdaulat selama diberi mandat oleh rakyat. Kedaulatan

²¹ Thomas Hobbes, *Leviathan* (England: Abraham Bosse, 1651), hlm. 73.

²² John Locke, *Two Treatises of Government* (London: Berkeley Square, 1821), hlm. 24.

²³ Montesquieu, *The Spirit of the Laws* (Berkeley Los Angeles London: University of California Press, 1977), hlm. 91.

tersebut akan tetap absah selama negara tetap menjalankan fungsi sesuai kehendak rakyat. Dalam menjalankan hidup keseharian negara, Rousseau tidak menghendaki demokrasi perwakilan melainkan langsung. Artinya, setiap masyarakat tidak mewakilkan kepentingan politiknya pada seseorang atau sekelompok orang, tetapi melakukan sendiri di kehidupan publik. Masing-masing rakyat datang ke pertemuan umum dan menegosiasikan kepentingannya dengan individu lain. Hal terpenting dalam tradisi pencerahan adalah dominasi hak-hak individu manusia (bukan Tuhan atau masyarakat). Untuk menjamin terselenggaranya hak tersebut, mereka memberi dukungan pada seseorang atau sekelompok orang untuk mengatur mereka. Dukungan melahirkan kekuasaan, dan kekuasaan demi menjaga stabilitas dan ketertiban agar setiap individu mampu menikmati hak-hak mereka dengan rasa aman.²⁴

Tradisi Modern di gerbongi oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Heinrich Marx, dan John Stuart Mill. Dalam Magnum Opus-nya "*The Phenomenology of Mind*" Hegel mengatakan bahwa ada satu kekuatan absolut yang sedang bekerja di dunia ini. Kekuatan tersebut ia sebut Ide Mutlak. Ide mutlak bergerak dalam sejarah dan bentuk yang paling sempurna adalah negara. Negara berasal dari gerak dialektis (pertentangan) di tengah masyarakat. Pertentangan mengalami penyelesaian melalui media terbentuk dan terselenggaranya negara. Dengan demikian, negara adalah bentuk tertinggi pengorganisasian manusia dan ia mengatasi kepentingan-kepentingan individu. Kepentingan negara harus didahulukan ketimbang yang terakhir.²⁵

Karl Heinrich Marx dalam Magnum opus-nya "Manifesto Komunis" (bersama Friedrich Engels) menentang gurunya (Hegel). Ia menyatakan bahwa negara sekedar alat dari kelas 'kaya' ekonomis untuk mengisap kelas 'miskin' (proletar). Dengan adanya negara, penindasan kelas pertama

²⁴ Jean Jacquwa Rousseau, *The Social Contract and the Discourse*, terj. G.D.H. Cole (London: David Campell Publishers Ltd, 1993), hlm. 105.

²⁵ G.W.F Hegel, *The Phenomenology of Mind* (London: George Allen & Unwin Ltd, 1961), hlm. 81.

atas yang kedua berlanjut. Penindasan hanya dapat dihentikan jika negara dihapuskan. Penghapusan negara melalui revolusi proletariat.²⁶

John Stuart Mill dalam Magum opusnya “On Liberty” menekankan perlunya menjunjung tinggi kehidupan politik yang negosiatif. Baginya, negara muncul hanya sebagai instrumen untuk menjamin kebebasan individu. Bagi Mill, hal yang harus diperbuat negara adalah menciptakan Greatest Happiness for Greatest Number (kebahagian terbesar untuk jumlah yang terbesar). Bagi Mill, dengan demikian, prinsip mayoritas harus dijunjung tinggi dalam suatu negara. Baginya, yang ‘banyak’ harus didahulukan ketimbang yang sedikit.²⁷

Jika pendekatan filsafat politik menekankan pada ide-ide dasar seputar dari mana kekuasaan berasal, bagaimana kekuasaan dijalankan, serta untuk apa kekuasaan diselenggarakan, maka pendekatan institusional menekankan pada penciptaan lembaga-lembaga untuk mengaplikasikan ide-ide ke dalam kenyataan.

Secara sederhana, pendekatan institusional dapat dilihat pada narasi berikut;²⁸ bahwa kekuasaan (asal-usul, pemegang, dan cara penyelenggaraannya) dimuat dalam konstitusi. Obyek konstitusi adalah menyediakan UUD bagi setiap rezim pemerintahan. Konstitusi menetapkan kerangka filosofis dan organisasi, membagi tanggung jawab para penyelenggara negara, bagaimana membuat dan melaksanakan kebijaksanaan umum. Dalam konstitusi dikemukakan apakah negara berbentuk federal atau kesatuan, sistem pemerintahannya berjenis parlementer atau presidensial. Negara federal adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan pemerintah pusat dibagi ke dalam beberapa negara bagian. Negara kesatuan adalah negara di mana otoritas dan kekuasaan pemerintah pusat disentralisir. Badan pembuat UU (legislatif) berfungsi mengawasi penyelenggaraan negara oleh eksekutif. Anggota

²⁶ Karl Marx dan Friedrich Engels, *Manifesto Partai Komunis* (Semarang: ISEA, 2002), hlm. 69.

²⁷ John Stuart Mill, *On Liberty* (London: Longman Roberts & Green, 1869), hlm. 117.

²⁸ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, hlm. 245.

badan ini berasal dari anggota partai yang dipilih rakyat lewat pemilihan umum. Badan eksekutif sistem pemerintahan parlementer dikepalai Perdana Menteri, sementara pada sistem presidensial oleh presiden. Para menteri di sistem parlementer dipilih perdana menteri dari keanggotaan legislatif, sementara di sistem presidensial dipilih secara prerogatif oleh presiden. Badan Yudikatif melakukan pengawasan atas kinerja seluruh lembaga negara (legislatif maupun eksekutif). Lembaga ini melakukan penafsiran atas konstitusi jika terjadi persengketaan antara legislatif versus eksekutif. Lembaga asal-muasal pemerintahan adalah partai politik. Partai politik menghubungkan antara kepentingan masyarakat umum dengan pemerintah via pemilihan umum. Di samping partai, terdapat kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mampu mempengaruhi keputusan politik tanpa ikut ambil bagian dalam sistem pemerintahan. Terdapat juga kelompok penekan, yaitu suatu kelompok yang secara khusus dibentuk untuk mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan umum di tingkat parlemen. Dalam menjalankan fungsinya, eksekutif ditopang oleh (administrasi negara). Ia terdiri atas birokrasi-birokrasi sipil yang fungsinya melakukan pelayanan publik.

Jika pendekatan institusionalisme meneliti lembaga-lembaga negara (abstrak), pendekatan behavioralisme khusus membahas tingkah laku politik individu. Behavioralisme menganggap individu manusia sebagai unit dasar politik (bukan lembaga, seperti pendekatan institusionalisme). Mengapa satu individu berperilaku politik tertentu serta apa yang mendorong mereka, merupakan pertanyaan dasar dari behavioralisme.²⁹ Behavioralisme meneliti motivasi apa yang membuat satu individu ikut dalam demonstrasi, apakah individu tertentu bertoleransi terhadap pandangan politik berbeda, atau mengapa si A atau si B ikut dalam partai Hanura bukan partai Gerindra?

Lain halnya dengan pendekatan pluralisme. Pendekatan ini memandang bahwa masyarakat terdiri atas beraneka ragam kelompok. Penekanan pendekatan pluralisme adalah pada interaksi antar kelompok tersebut. C. Wright Mills pada tahun 1961 menyatakan bahwa interaksi kekuasaan antar

²⁹ S.HLM. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), hlm. 94-102

kelompok tersusun secara piramidal.³⁰ Robert A. Dahl sebaliknya, pada tahun 1963 menyatakan bahwa kekuasaan antar kelompok relatif tersebar, bukan piramidal.³¹ Peneliti lain, yaitu Floyd Huter menyatakan bahwa karakteristik hubungan antar kelompok bercorak top-down (mirip seperti Mills).³²

Adapun pendekatan struktural, penekanan utamanya adalah pada anggapan bahwa fungsi-fungsi yang ada di sebuah negara ditentukan oleh struktur-struktur yang ada di tengah masyarakat, bukan oleh mereka yang duduk di posisi lembaga-lembaga politik.³³ Misalnya, pada zaman kekuasaan Mataram (Islam), memang jabatan raja dan bawahan dipegang oleh pribumi (Jawa). Namun, struktur masyarakat saat itu tersusun secara piramidal yaitu Belanda dan Eropa di posisi tertinggi, kaum asing lain (Cina, Arab, India) di posisi tengah, sementara bangsa pribumi di posisi bawah. Dengan demikian, meskipun kerajaan secara formal diduduki pribumi, tetapi kekuasaan dipegang oleh struktur teratas, yaitu Belanda (Eropa). Contoh lain dari strukturalisme adalah kerajaan Inggris. Dalam analisa Marx, kekuasaan yang sesungguhnya di Inggris akan dipegang oleh ratu atau kaum bangsawan, melainkan kaum kapitalis yang 'mendadak' kaya akibat revolusi industri. Kelas kapitalis inilah (yang menguasai perekonomian negara) sebagai struktur masyarakat yang benar-benar menguasai negara. Negara bagi Marx, hanya alat dari struktur kelas ini.

Sedangkan pendekatan developmental yang populer saat muncul negara-negara baru pasca perang dunia II menekankan pada aspek pembangunan ekonomi serta politik yang dilakukan oleh negara-negara baru tersebut. Karya klasik pendekatan ini diwakili oleh Daniel Lerner melalui kajiannya

³⁰ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, hlm.465-467. Lihat juga Ronald HLM. Chilcote, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), hlm.358.

³¹ Robert A. Dahl. (ed.), *Regimes and Oppositions.*, Bab pendahuluan.

³² Ronald HLM. Chilcote, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*, (Boulder, Colorado: Westview Press, 1981), hlm.358.

³³ *Ibid.*, hlm.195-6.

di sebuah desa di Turki pada tahun 1958. Menurut Lerner, mobilitas sosial (urbanisasi, literasi, terpaan media, partisipasi politik) mendorong pada terciptanya demokrasi. Karya klasik lain ditengarai oleh karya Samuel P. Huntington dalam “Political Order in Changing Society” pada tahun 1968. Karya ini membantah kesimpulan Daniel Lerner. Bagi Huntington, mobilitas sosial tidak secara linear menciptakan demokrasi, tetapi dapat mengarah pada instabilitas politik. Menurut Huntington, jika partisipasi politik tinggi, sementara kemampuan pelembagaan politik rendah, akan muncul situasi disorder.³⁴ Bagi Huntington, hal yang harus segera dilakukan negara baru merdeka adalah memperkuat otoritas lembaga politik seperti partai politik, parlemen, dan eksekutif.

Kedua peneliti terdahulu berbias ideologi Barat. Dampak dari ketidaktahuan negara-negara baru tidak mereka sentuh. Misalnya, negara dengan sumberdaya alam makmur mengapa tetap miskin. Penelitian jenis baru ini diperkenalkan oleh Andre Gunder Frank melalui penelitian dalam buku “Capitalism and Underdevelopment in Latin America. Bagi Frank, penyebab terus miskinnya negara-negara ‘dunia ketiga’ adalah akibat 1. modal asing; 2. perilaku pemerintah lokal yang korup; dan 3. kaum borjuis negara satelit yang ‘manja’ pada pemerintahnya. Frank menyarankan agar negara-negara ‘dunia ketiga’ memutuskan seluruh hubungan dengan negara maju (Barat).³⁵

Paparan di atas memperlihatkan sekian ragam kajian politik yang bercita rasa humanis an sich. Semua gagasan bermula dari manusia, oleh manusia dan terpulang kepada manusia juga. Artinya manusia terlibat dalam kepentingan manusianya (from, by and for insider) yang tentu saja bias. Oleh karenanya perlu kajian yang dapat menjaga obyektifitas itu dengan mengintrodusir apa yang ada di luar diri manusia itu sendiri. Artinya importisasi konsep dari luar

³⁴ Samuel HLM. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press 1968), hlm.5.

³⁵ Ronald HLM. Chilcote, *Theories of Comparative Politics*, hlm. 290-1

diri manusia, yang dalam hal ini mengutip konsep politik kenabian (politik profetik)

Gagasan Politik Profetik

Diksi profetik adalah salah satu gagasan penting Kuntowijoyo. Baginya, ilmu sosial tidak boleh berpuas diri dalam usaha untuk menjelaskan atau memahami realitas dan kemudian memaafkannya begitu saja. Ilmu sosial harus juga mengemban tugas transformasi menuju cita-cita yang diidealkan masyarakatnya. Kunto merumuskan tiga nilai dasar sebagai pijakan profetik, yaitu; humanisasi, liberasi dan transendensi.

Filosofi munculnya profetik, bermula dari kritik Auguste Comte sang pencipta istilah “sosiologi”, yang menandakan bahwa sosiologi adalah puncak perkembangan positivisme. Tak heran jika kemudian ilmu yang satu ini berkembang dengan corak yang sangat positivistik. Sebenarnya Comte tidak sedang mengarahkan sosiologi untuk menjadi positivistik, ia hanya menyuarakan kecenderungan zaman. Di masanya, positivisme menjadi ukuran sah tidaknya ilmu pengetahuan. Ilmu alam menjadi model bagi orientasi ilmu tentang masyarakat yang sebelum Comte disebut sebagai “fisika sosial”, atau ilmu pengetahuan alam tentang masyarakat. Proses-proses sosial tidak lagi dianggap sebagai produk kegiatan manusia yang bebas, tapi sebagai suatu peristiwa alam.³⁶

Setidaknya ada tiga pengandaian dalam ilmu-ilmu sosial positivis. Pertama, prosedur-prosedur metodologis dari ilmu-ilmu alam dapat langsung diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial. Kedua, hasil-hasil penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk hukum-hukum seperti dalam ilmu-ilmu alam. Ketiga, ilmu-ilmu sosial itu harus bersifat teknis, yaitu menyediakan pengetahuan yang bersifat instrumental murni, netral dan bebas nilai.³⁷

³⁶ L. Laeyendecker, *Tata, Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, terj. Sumekto (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 137.

³⁷ Anthony Giddens (Ed.), *Positivism and Sociology* (London: Heinemann, 1975), hlm. 3-4

Ketiga dasar positivisme itu pun kemudian terbukti rapuh. Fenomena sosial tidak sama dengan fenomena alam sehingga pemakaian metode ilmu alam untuk mengkaji fenomena sosial adalah salah arah. Teori-teori yang tercipta juga tidak universal sebagaimana klaim positivis, tapi sangat terkait dengan dimensi lokal dan temporal di mana teori itu muncul. Demikian pula, dalam kenyataannya, ilmu sosial ternyata tidak pernah mampu melepaskan diri dari keberpihakan terhadap nilai-nilai tertentu. Klaim bebas nilai tak lebih dari sebetuk hipokrasi intelektual. Inilah gugatan-gugatan yang dilontarkan sebagian ilmuwan sosial, baik Barat maupun Timur, terhadap positivisme.

Klaim bebas nilai menyebabkan ilmu-ilmu sosial hanya berusaha menjelaskan realitas (erklaren) secara apa adanya tanpa melakukan pemihakan, atau memahami realitas (verstehen) kemudian memaafkannya. Teori-teori sosial melulu ingin menyalin fakta masa kini. Dengan cara itu, ilmu sosial diam-diam melestarikan masa kini, sehingga, dengan kedok tidak memihak, netral, bebas nilai, teori-teori itu menutupi kemungkinan perubahan ke masa depan.³⁸ Karena itu teori yang mengklaim dirinya bebas nilai pada hakekatnya juga memihak, memihak kemapanan.

Salah satu perlawanan sengit terhadap logika positivisme datang dari para penganut teori kritis. Teori Kritis hendak mengkritik keadaan-keadaan aktual dengan referensi pada tujuannya. Karenanya, di dalam teori kritis, terkandung muatan utopia tertentu yang menyebabkan pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalamnya tidak netral.

Dengan semangat yang sama (membawa misi tertentu dalam mengkritik), maka perlu dilontarkan ide tentang Ilmu Politik Profetik. Ilmu Politik Profetik tidak hanya menolak klaim bebas nilai dalam positivisme tapi lebih jauh juga mengharuskan ilmu politik untuk secara sadar memiliki pijakan nilai sebagai tujuannya. Ilmu Politik Profetik tidak hanya berhenti pada usaha menjelaskan dan memahami realitas apa adanya tapi lebih dari

³⁸ F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi, Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Cet. 2 (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 58.

itu mentransformasikannya menuju cita-cita yang diidamkan masyarakatnya. Ilmu Politik Profetik kemudian merumuskan tiga nilai penting sebagai pijakan yang sekaligus menjadi unsur-unsur yang akan membentuk karakter paradigmatiknya, yaitu humanisasi, liberasi dan transendensi

a. Humanisasi

Dalam Ilmu Politik Profetik, humanisasi artinya memanusiakan manusia, menghilangkan “kebendaan”, ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. Humanisasi sesuai dengan semangat liberalisme Barat. Hanya saja perlu segera ditambahkan, jika peradaban Barat lahir dan bertumpu pada humanisme antroposentris, konsep humanisme politik profetik berakar pada humanisme teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi (tuhan) yang menjadi dasarnya (telah menciptanya).

Humanisme Barat lahir dari pemberontakan terhadap kekuasaan Gereja yang bersifat dogmatis pada abad Pertengahan. Pandangan antroposentris beranggapan bahwa kehidupan tidak berpusat pada Tuhan tapi pada manusia. Etosnya adalah semangat menghargai nilai-nilai yang dibangun oleh manusia sendiri. Peradaban antroposentris menjadikan manusia sebagai tolok ukur kebenaran dan kepaluan, untuk memakai manusia sebagai kriteria keindahan dan untuk memberikan nilai penting pada bagian kehidupan yang menjanjikan kekuasaan dan kesenangan manusia. Antroposentrisme menganggap manusia sebagai pusat dunia, karenanya merasa cukup dengan dirinya sendiri. Manusia antroposentris merasa menjadi penguasa bagi dirinya sendiri. Tidak hanya itu, ia pun bertindak lebih jauh, ia ingin menjadi penguasa bagi yang lain. Alam raya pun lalu menjadi sasaran nafsu berkuasanya yang semakin lama semakin tak terkendali.

Dengan rasio sebagai senjatanya, manusia antroposentris memulai sejarah kekuasaan dan eksploitasi tanpa batas. Modernisme dengan panji-panji rasionalismenya terbukti menimbulkan kerusakan sistemik tak terperikan terhadap alam dan manusia. Ilmu akal adalah ilmu perang yang

metode dan taktik perangnya telah ditulis dengan amat cerdas oleh Descartes melalui sembojannya “Cogito Ergo Sum”. Melalui ilmu perang Descartes, peradaban modern menciptakan mesin-mesin perang terhadap alam berupa teknologi canggih untuk menaklukkan dan mengeksploitasi tanpa batas, juga mesin-mesin perang terhadap manusia berupa senjata-senjata canggih supermodern, bom, bahkan juga senjata pemusnah masal. Jadi, alih-alih humanisme antroposentris itu berhasil melakukan proses humanisasi, yang terjadi justru adalah proses dehumanisasi.³⁹

Politik profetik mengusulkan humanisme teosentris sebagai ganti humanisme antroposentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan konsep ini, manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia (kemanusiaan) sendiri. Perkembangan peradaban manusia tidak lagi diukur dengan rasionalitas tapi transendensi. Humanisasi diperlukan karena masyarakat sedang berada dalam tiga keadaan akut yaitu dehumanisasi (obyektivasi teknologis, ekonomis, budaya dan negara), agresivitas (agresivitas kolektif dan kriminalitas) dan loneliness (privatisasi, individuasi).

b. Liberasi

Liberasi dalam Ilmu politik profetik sejalan dengan prinsip sosialisme (marxisme, komunisme, teori ketergantungan, teologi pembebasan). Hanya saja Ilmu politik profetik tidak hendak menjadikan liberasinya sebagai ideologi sebagaimana komunisme. Liberasi Ilmu politik profetik adalah dalam konteks ilmu, yaitu ilmu yang didasari pada nilai-nilai luhur transendental dan membebaskan dari nilai-nilai material. Jika nilai-nilai liberatif dalam teologi pembebasan dipahami dalam konteks ajaran teologis, maka nilai-nilai liberatif dalam politik profetik dipahami dan didudukkan dalam konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan kelimpahan, dominasi struktur yang

³⁹ Kuntowijoyo, “Strategi Budaya Islam: Mempertimbangkan Tradisi “ dalam *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 478-486.

menindas dan hegemoni kesadaran palsu. Lebih jauh, jika marxisme dengan semangat liberatifnya justru menolak agama yang dipandangnya konservatif, politik profetik justru mencari sandaran semangat liberatifnya pada nilai-nilai profetik transendental dari agama yang telah ditransformasikan menjadi ilmu yang obyektif-faktual.

Bidikan liberasi ada pada realitas empiris, sehingga liberasi sangat peka dengan persoalan penindasan atau dominasi struktural. Fenomena kemiskinan yang lahir dari ketimpangan ekonomi adalah bagian penting dari proyek liberasi. Liberasi menempatkan diri bukan pada lapangan moralitas kemanusiaan abstrak, tapi pada realitas kemanusiaan empiris, bersifat kongkrit. Sikap menghindar dari yang kongkrit menuju abstrak adalah salah satu ciri berpikir berdasarkan mitos.

Ilmu politik profetik menggariskan empat sasaran liberasi, yaitu sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik yang membelenggu manusia sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang merdeka dan mulia.

c. Transendensi

Transendensi merupakan dasar dari dua unsur yang di atas. Transendensi hendak menjadikan nilai-nilai transendental (keimanan) sebagai bagian penting dari proses membangun peradaban. Transendensi menempatkan agama (nilai-nilai Islam) pada kedudukan yang sangat sentral dalam Ilmu politik profetik.

Ekses-ekses negatif yang ditimbulkan oleh modernisasi mendorong terjadinya gairah untuk menangkap kembali alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh agama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Manusia produk renaissance adalah manusia antroposentris yang merasa menjadi pusat dunia, cukup dengan dirinya sendiri. Melalui proyek rasionalisasi, manusia memproklamkan dirinya sebagai penguasa diri dan alam raya. Rasio mengajari cara berpikir bukan cara hidup. Rasio menciptakan alat-alat bukan kesadaran. Rasio mengajari manusia untuk

menguasai hidup, bukan memaknainya. Akhirnya manusia menjalani kehidupannya tanpa makna.

Di sinilah transendensi dapat berperan penting dalam memberikan makna yang akan mengarahkan tujuan hidup manusia. Islam dapat membawakan kepada dunia yang sekarat, bukan karena kurang alat atau teknik, akan tetapi karena kekurangan maksud, arti dari masyarakat yang ingin merealisasikan rencana Tuhan. Nilai-nilai transendental ketuhanan inilah yang akan membimbing manusia menuju nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Transendensi adalah dasar dari humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi arah kemana dan untuk tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi dalam Ilmu Politik Profetik di samping berfungsi sebagai dasar nilai bagi praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengabdikan pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan dibebaskan dari kesadaran materialistik di mana posisi ekonomi seseorang menentukan kesadarannya, menuju kesadaran transendental. Transendensi akan menjadi tolok ukur kemajuan dan kemunduran manusia.⁴⁰

Gagasan Ilmu politik profetik diletakkan di atas basis material. Dengan ini, Ilmu Politik Profetik berniat untuk menjadi paradigma baru. Marxisme menawarkan paradigma baru dengan kaidahnya mengenai *structure* (basis material) dan *superstructure* (basis kesadaran) dengan menyatakan bahwa *structure* menentukan *superstructure*. Feminisme menyatakan bahwa seks (jenis kelamin) menentukan kesadaran. Ilmu Politik Profetik membalikkan rumusan ini dengan meletakkan kesadaran (*superstructure*) di atas basis material (*structure*). Gagasan ini diyakini akan begitu banyak pengaruhnya dalam lapangan ilmu politik dan humaniora.

⁴⁰ *Ibid.*

Penutup

Sejarah peradaban manusia berlangsung cukup lama. Secara historis, peradaban tersebut telah mencatat tiga episode sejarah (Yunani, Abad Tengah dan Modern). Ketiga episode tersebut ditandai dengan hegemoni dua kekuatan, yaitu hati dan akal. Jika pada episode Yunani, akal mendominasi, pada abad tengah hati menghegemoni, maka pada abad modern akal kembali mengambil alih dominasi. Secara siklus, maka pasca episode modern (sebut post modernism), sejatinya yang menghegemoni adalah kekuatan hati. Di sinilah kontribusi ajaran agama memainkan peran, termasuk dalam perbincangan politik yang di antaranya gagasan politik profetik di atas.

Dalam perspektif epistemologi, terdapat tiga ranah epistemologi, yaitu empirik, rasional dan irrasional. Jika empirik, berdasarkan pada cerapan inderawi, rasional kepada olah otak, maka irrasional menekankan pada olah hati/spiritual. Dalam konteks ini, kontribusi konsep ajaran agama dapat dilibatkan dalam perbincangan ranah irrasional, yang sejauh ini cenderung kurang dilibatkan.

Melihat pada fakta belantika politik hingga hari ini, rekonstruksi politik dengan melibatkan konsep ajaran agama menjadi keniscayaan. Salah satunya adalah gagasan politik profetik, yaitu politik yang bersendi pada konsep agama yang menekankan semangat kemanusiaan, pembebasan dan bernilai ketuhanan. Hal ini menjadi solusi alternatif atas residu politik yang sarat dengan dehumanisasi, deliberasi dan despiritualisasi, yang pada akhirnya tidak menjadikan manusia menjadi lebih baik dengan berpolitik melainkan *chaos*.

Daftar Pustaka

- Apter, David E. , *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Benedanto , Pax, *Politik Kekuasaan menurut Niccolo Machiavelli : Il Principe*, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Chilcote , Ronald H., *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*, Boulder, Colorado: Westview Press, 1981.
- Dahl , Robert A., *Regimes and Oppositions*. Boulder, Colorado: Westview Press, 1981.
- Giddens , Anthony (Ed.), *Positivism and Sociology*, London: Heinemann, 1975.
- Goodin , Robert E., dkk, *A New Handbook of Political Science*, New York: Oxford University Press, 1996 .
- Hardiman , F. Budi, *Kritik Ideologi, Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Huntington, Samuel P., *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press 1968.
- Laeyendecker, L., *Tata, Perubahan dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, terj. Sumekto, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Marx , Karl, dkk, *Manifesto Partai Komunis*, Semarang: ISEA, 2002.
- McDonald, Lee Cameron, *Western Political Theory Part 2: From Machiavelli to Burke*, Pomona: Harcourt race Jovanovich, 1968
- Rapar , J.H., *Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Rodee , Carlton Clymer, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Rajawali, 1997.

Suhelmi , Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Graedia, 2001.

Suriasumantri , Jujun S., *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995 .

Suseno , Franz Magnis-, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 1999.

Varma , S.P., *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.

